

Analisis *Flypaper Effect* pada Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2019-2021)

Putu Etha Naraswari Wira¹, Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi²

S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

e-mail: ¹| etha@undiksha.ac.id, ²| ayu.wulan@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan Asli Daerah terhadap belanja daerah serta mengetahui terjadi atau tidak fenomena *flypaper effect* dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia selama periode tahun 2019-2021. Objek penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang mempublikasikan laporan realisasi APBD tahunan (*annual*) di situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019-2021. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan beberapa pertimbangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap variabel belanja daerah. Nilai koefisien DAK dan SiLPA < nilai koefisien PAD. Sehingga, hal ini menunjukkan tidak terjadinya *flypaper effect* pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia selama periode tahun 2019-2021. Kesimpulannya, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan tidak terjadinya fenomena *flypaper effect*.

Kata kunci: *dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, belanja daerah, flypaper effect.*

Abstract

This determine the influence of Special Allocation Funds, Original Regional Income, and Surplus Budget Calculations on regional spending and determine whether or not the flypaper effect occurred in regional government financial management in Indonesia during 2019-2021. The object research includes regional governments in Indonesia that publish APBD realization reports the website of Directorate General Regional Government Financial Balance 2019-2021. The sample selection in study used purposive sampling technique using several considerations according to desired criteria. The research results show the DAK, PAD, and SiLPA variables have a significant effect and positive relationship with regional expenditure variables. DAK and SiLPA coefficient values < PAD coefficient values. this shows that no flypaper effect on regional government financial management in Indonesia during the 2019-2021 period. The conclusion from research is that Special Allocation Funds, Original Regional Income, Surplus Budget Calculations have a positive effect on regional spending and flypaper effect phenomenon not occur.

Keywords: *special allocation funds, original regional income, remaining over budget calculations, regional expenditures, flypaper effect .*

1. Pendahuluan

Dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 29 September 2022 telah menyetujui bahwa Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 guna disahkan menjadi Undang-Undang. Salah satu bagian penting dalam belanja negara tersebut yaitu Dana Transfer ke Daerah yang dimana jumlahnya mencapai Rp814,72 triliun. Adapun rincian alokasi per daerah secara resmi akan dituangkan dalam

Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara TA 2023, sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) setiap provinsi sebesar Rp. 136,26 triliun
2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 396,00 triliun, yang terdiri dari bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 286,77 triliun dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 109,23 triliun untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, dan pendanaan layanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 185,80 triliun, yang terdiri atas :
 - a. DAK Fisik sebesar Rp. 53,42 triliun guna mendukung peningkatan kualitas SDM, konektivitas daerah, pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan.
 - b. DAK Nonfisik sebesar Rp. 130,20 triliun, yang terdiri dari 12 jenis dana yaitu : penggabungan Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesehatan menjadi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Serta Dana TPG, meningkatkan efisiensi pengelolaan dana BOSP dan Tunjangan Guru, serta pemisahan dana BOK menjadi dana BOK Dinas dan BOK Puskesmas untuk meningkatkan efisiensi penyaluran.
 - c. Hibah daerah sebesar Rp. 2,08 triliun.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tujuan dari Dana Alokasi Khusus adalah sebagai pendanaan kegiatan spesifik di suatu daerah tertentu yang berdasarkan pada prioritas nasional ataupun merupakan urusan daerah. Sikap pemerintah daerah terhadap proses pengalokasian DAK mengindikasikan timbulnya penilaian bahwa Pemerintah Pusat tidak berlaku transparan terhadap pemberian DAK ke daerah. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antar instansi dalam pengelolaan DAK terlihat masih terbatas. Apabila pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah menggunakan lebih banyak dana transfer pemerintah pusat atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat (*unconditional grants*) yaitu DAK pada PAD akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah. Dengan adanya fenomena tersebut yang dimana ketergantungan dalam penggunaan dana transfer pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerah menjadi kurang optimal, yang dimana PAD yang seharusnya dapat dikembangkan untuk membiayai belanja daerah menjadi tidak optimal dan jika dana transfer DAK yang diperoleh suatu daerah sangat besar, maka pemerintah daerah cenderung akan lebih berusaha untuk tahun selanjutnya DAK yang didapatkan daerah tersebut tetap sehingga mengakibatkan PAD menjadi tidak signifikan. Dengan begitu, pada penelitian ini menggunakan DAK sebagai variabel guna mengetahui apakah daerah tersebut lebih banyak menggunakan DAK daripada PAD daerah tersebut dalam membiayai belanja daerahnya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Hermanto, 2017) dan (Syofyan, 2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang diajukan yakni:

H₁: Dana Alokasi Khusus (X₁) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah

Salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk meningkatkan belanja daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah yang didapatkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pungutan daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah dijadikan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dapat meningkatkan kemandirian daerah, dimana kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanannya kepada masyarakat.

Dalam meningkatkan kemandirian daerah, peningkatan PAD harus didukung dengan adanya peningkatan belanja daerah pula, hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan harus didukung dengan fasilitas publik sehingga nantinya dapat menjadi sumber PAD dari pajak

dan retribusi daerah. Sehingga, dengan adanya alokasi belanja daerah untuk fasilitas publik nantinya akan dapat meningkatkan PAD berupa penerimaan pajak dan dapat mengurangi adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Riduwan, 2021) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan yakni:

H₂: Pendapatan Asli Daerah (X₂) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah

Sumber pendanaan yang dikelola guna meningkatkan pengalokasian belanja daerah juga berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mendeskripsikan SiLPA sebagai selisih antara surplus atau defisit suatu anggaran dengan pembiayaan neto. Terdapat salah satu penyebab dari tidak sesuainya daerah yang memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang berlebihan, yang dimana SiLPA pada suatu daerah seharusnya bernilai nol. Banyaknya daerah di Indonesia yang tidak sesuai dengan tanggal pengesahan APBD oleh DPRD mengakibatkan terhambatnya realisasi anggaran dan menyebabkan banyak daerah yang merealisasikan anggarannya pada pertengahan tahun anggaran. Sehingga anggaran yang tidak terealisasi tersebut pada akhir tahun anggaran akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dengan begitu, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Solikin, 2016) dan (Marici, 2022) Hipotesis ketiga yang diajukan yaitu:

H₃: SiLPA (X₃) berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi belanja daerah yang dikeluarkan dapat diharapkan semakin meningkatnya perekonomian daerah, yang dimana dengan semakin meningkatnya belanja daerah maka dana yang dibutuhkan semakin besar guna terpenuhinya kebutuhan pemerintah daerah. Menurut (Kainde, 2013) menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja dapat digunakan sebagai penunjang pertumbuhan pembiayaan melalui belanja daerah sehingga nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Belanja daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mendorongnya pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut (Juanda, 2016) menjelaskan bahwa kualitas belanja daerah dapat tercapai apabila pada prioritas belanja dilakukan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan, tepat waktu, dan didukung oleh para pemangku kepentingan daerah sehingga perencanaan maupun penganggaran dapat berjalan secara akuntabel. Apabila fenomena tersebut terpenuhi, maka masyarakat daerah dapat merasakan manfaat yang diperoleh. Artinya setiap daerah diwajibkan untuk selalu efektif dalam melakukan belanja daerah guna mencapai target pembangunan daerah baik dalam sisi output, outcome, dan impact.

Menurut (Hofman et al, 2006) mendapatkan hasil evaluasi perimbangan fiskal di Negara Indonesia yaitu seluruh pemerintah daerah sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat guna membiayai kesenjangan PAD yang sangat terbatas dengan tingkat belanja pemerintah yang berlaku. Instrumen yang dimanfaatkan pemerintah pusat dalam mengurangi ketimpangan fiskal di setiap daerah yaitu dengan cara diberikannya dana perimbangan. Hal tersebut terjadi dikarenakan pemerintah daerah belum memaksimalkan potensi fiskal serta adanya kesenjangan antara kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terhadap kebutuhan daerah (Suyatno, 2013). Dengan demikian, menjelaskan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi penunjang utama bagi setiap daerah.

Flypaper effect merupakan kondisi dimana belanja pemerintah daerah lebih cenderung merespon atau lebih banyak menggunakan pendapatan dana transfer untuk kepentingan belanja daerah daripada mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah yang diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah. Analisis *flypaper effect* berupaya menunjukkan apakah dalam suatu daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat serta dapat mengetahui perilaku daerah pada saat terjadinya peningkatan dana transfer yang sepadan terhadap PAD. Penelitian yang dilakukan (Ardanaeswari, 2019) dan (Dewi, 2017) menjelaskan bahwa fenomena *flypaper effect* tidak hanya terjadi pada

kabupaten/kota yang memiliki PAD rendah namun juga dapat terjadi pada kabupaten/kota yang memiliki PAD tinggi. Sehingga hipotesis keempat yang diajukan yaitu:

H₄ : Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Solikin, 2016) dimana pada penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yaitu variabel independen PAD, DAU, dan SiLPA secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Pada periode 2012 hingga 2014 telah terjadi flypaper effect pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel independen yaitu Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang dimana kedua variabel tersebut masih sedikit yang menggunakannya sebagai variabel penelitian dan adanya perbaharuan tahun dilakukannya penelitian ini yaitu tahun 2019-2021.

Selain itu adanya ketidak konsistenan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Solikin, 2016) yang mendapatkan hasil bahwa telah terjadi flypaper effect pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota yang diteliti, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Dari penjelasan secara umum diatas maka peneliti akan meneliti sejauh mana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah dan apakah terdapat flypaper effect dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2019 sampai 2021. Berangkat dari adanya permasalahan tersebut, maka tujuan dari adanya penelitian adalah menguji pengaruh DAK, PAD, dan SiLPA terhadap belanja daerah serta mengetahui terjadi atau tidak terjadi flypaper effect dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2019 -2021. Dengan demikian, judul penelitian ini yaitu "Analisis Flypaper Effect Pada Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2019-2021)"

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia (34 Provinsi). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian adalah provinsi di Indonesia yang mempublikasikan laporan realisasi APBD tahunan (*annual*) di situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019-2021 dan 34 Provinsi di Indonesia yang melaporkan realisasi anggaran di sektor DAK, PAD, SiLPA, dan belanja daerah serta jumlahnya tidak bernilai nol (0) atau minus (-). Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, hasil pengumpulan dan seleksi data penelitian seluruh provinsi periode tahun 2019 sampai 2021 berjumlah 102. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung melalui perantara, data dalam penelitian ini bersumber dari situs departemen keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.djpk.go.id).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil pada penelitian ini meliputi hasil uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 : Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|----------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| X1_DAK | 102 | 26.56 | 30.75 | 28.3125 | .95470 |
| X2_PAD | 102 | 26.57 | 31.45 | 28.4280 | 1.14673 |
| X3_SILPA | 102 | 24.07 | 31.00 | 26.7704 | 1.34941 |
| Y_BD | 102 | 28.22 | 31.92 | 29.5880 | .83304 |

| | | | | |
|--------------------|-----|--|--|--|
| Valid N (listwise) | 102 | | | |
|--------------------|-----|--|--|--|

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa pada variabel bahwa jumlah sampel atau N penelitian yang valid berjumlah 102. Variabel Dana Alokasi Khusus (X_1) selama tahun pengamatan memiliki nilai rata-rata sebesar 28.3125 dari 102 sampel mendekati nilai maksimal sebesar 30.75 dengan nilai minimal sebesar 26.56 dan standar deviasinya 0.95470. Nilai rata-rata 28.3125 lebih mendekati nilai maksimum sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus setiap provinsi di Indonesia cenderung baik.

Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2) selama tahun pengamatan memiliki nilai minimal sebesar 26,57, nilai maksimal 31.45, nilai rata-rata 28.4280 dan standar deviasinya senilai 1.14673. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata 28.4280 lebih mendekati nilai maksimal sehingga Pendapatan Asli Daerah setiap provinsi di Indonesia cenderung baik.

Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X_3) selama tahun pengamatan memiliki nilai rata-rata sebesar 26.7704 dari keseluruhan sampel. Dan memiliki nilai maksimal sebesar 31.92, nilai minimum 24.07, dengan standar deviasinya senilai 1.34941. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata SiLPA 26.7704 mendekati nilai maksimum sehingga SiLPA setiap provinsi di Indonesia cenderung baik.

Pada variabel dependen Belanja Daerah (Y) selama tahun pengamatan memiliki nilai rata-rata sebesar 29.5880. nilai maksimal 31.92, nilai minimum sebesar 28.22 dengan standar deviasinya sebesar 0.83304. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai belanja daerah terhadap rata-rata sebesar 0.83304 dan nilai rata-rata mendekati nilai maksimal sehingga Belanja Daerah setiap provinsi di Indonesia cenderung baik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test*. Variabel penelitian dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai nilai *Kolmogorov Smirnov (K-S)* sebesar 0,102 dengan nilai signifikan sebesar 0,011 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi secara normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari besarnya nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai tolerance lebih besar dari 10% (0.10) dan VIF lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan model telah bebas dari masalah multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai VIF lebih kecil daripada 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas.

Uji asumsi klasik yang selanjutnya dilakukan adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika probabilitas signifikan masing-masing variabel independen > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa setiap masing-masing variabel bebas tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai *Absolut Residual* (AbsRes). Pada Variabel Dana Alokasi Khusus (X_1) mendapatkan hasil nilai signifikan sebesar 0,575, variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2) mendapatkan hasil nilai signifikan sebesar 0,504, dan pada variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X_3) mendapatkan hasil nilai signifikan sebesar 0.798. Dengan didapatkannya seluruh variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak adanya heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa varians dari satu pengamatan dengan pengamatan lainnya masih tetap sama, sehingga data dapat digunakan dalam penelitian.

Uji asumsi klasik yang selanjutnya adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu

pada periode sekarang dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson*. Dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* (d) sebesar 1.744 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1.738 dan kurang dari (4-dU) $4 - 1.738 = 2.262$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji *Durbin Watson*, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

Uji selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh diantara dua variabel independent atau lebih. Uji hipotesis yang pertama dilakukan adalah uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Koefisien Determinasi

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .943 ^a | .888 | .885 | .28263 |

a. Predictors: (Constant), X3_SILPA, X1_DAK, X2_PAD

Berdasarkan pada tabel 2, dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.885 yang menunjukkan bahwa variasi variabel dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dan sisa lebih perhitungan anggaran hanya mampu menjelaskan sebesar 88,5% variasi variabel belanja daerah. sedangkan sisanya sebesar 11.5% ($100\% - 88,5\% = 11.5\%$) dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi belanja daerah.

Uji statistik t menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variansi variabel dependen. Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan berikut:

- Apabila probabilitas > tingkat signifikan (0,05), maka H₀ diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
- Apabila probabilitas < tingkat signifikan (0,05), maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Hasil uji statistik t pada penelitian ini disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Uji Regresi Berganda

| Model | | Coefficients ^a | | | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 7.519 | .886 | | 8.491 | .000 |
| | X1_DAK | .161 | .040 | .184 | 3.997 | .000 |
| | X2_PAD | .471 | .038 | .649 | 12.519 | .000 |
| | X3_SILPA | .154 | .025 | .250 | 6.166 | .000 |

Berdasarkan perhitungan t tabel pada tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa nilai t tabel adalah 1.9844. Sehingga didapatkan hasil : (a) (H₁) menunjukkan bahwa variabel DAK memiliki nilai t hitung sebesar 3.997 yang memiliki arah positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Diketahui bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dibandingkan α yaitu $0.000 < 0.05$ dan memiliki nilai t hitung > t tabel sebesar $3.997 > 1.984$ dan H₁ diterima. (b) pengujian (H₂) menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki nilai t hitung sebesar 12.519 yang memiliki arah positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Diketahui bahwa tingkat signifikansi α

yaitu $0.000 < 0.05$ dan memiliki nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $12.519 > 1.984$, H_2 diterima. (c) pengujian (H_3) menunjukkan bahwa variabel SiLPA memiliki nilai t hitung sebesar 6.166 yang memiliki arah positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Diketahui bahwa tingkat signifikan α yaitu $0.000 < 0.05$ dan memiliki nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $6.166 > 1.984$, H_3 diterima. (d) Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah nilai koefisien DAK sebesar 0,161 dan nilai koefisien SiLPA sebesar 0,154 berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan, nilai koefisien PAD sebesar 0,471 berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan (H_4) ditolak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik t menunjukkan bahwa variabel dana alokasi khusus memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_1 memiliki kontribusi terhadap variabel Y . Nilai t positif menunjukkan bahwa ketika dana alokasi khusus naik, maka belanja daerah juga akan mengalami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang dimana dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada suatu daerah dengan tujuan guna membantu mendanai kegiatan yang bersifat khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Teori keagenan mengkaji mengenai hubungan antara agen dengan principal. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban sebagai agen untuk mempertanggungjawabkan keseluruhan aktivitas kepada masyarakat sebagai principal yang tentunya memiliki hak dalam meminta pertanggungjawaban kepada agen. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah berupa penyajian laporan yang kemudian digunakan oleh masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan termasuk mengelola keuangan. Salah satu bentuk dana yang hendak dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah adalah dana alokasi khusus yang diperuntukkan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dengan adanya dana alokasi khusus ini tentunya akan dapat meningkatkan dana yang dimiliki pemerintah daerah yang akan dikelola dalam menjalankan program kerja utamanya untuk menunjang perekonomian daerah dalam hal kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang telah dilakukan nampak bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hasil penelitian menyatakan bahwa dana alokasi khusus memiliki hubungan searah dengan kinerja keuangan yang berarti bahwa semakin tinggi dana alokasi khusus maka kinerja keuangan akan semakin baik pula. Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan transfer pusat/provinsi dan jumlah pinjaman yang dimiliki pemerintah daerah. Kaitannya dengan dana alokasi khusus bahwa dengan semakin tinggi DAK yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin tinggi pula dana yang digunakan menjalankan program kerja sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah karena lebih banyak dana yang dapat dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Bangun, 2019), (Syofyan, 2020), dan (NurRafi, 2023) yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik t menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_2 memiliki kontribusi terhadap variabel Y . Nilai t positif menunjukkan bahwa ketika semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima yang dimana PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Semakin besar pendapatan asli daerah tentunya semakin baik pengelolaan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Menurut (Yovita, 2011) menjelaskan bahwa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah daerah harus dapat menggali sumber-sumber potensi dari daerah seperti dari sektor perdagangan, pariwisata, pertanian, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat daerah

Hubungannya dengan teori keagenan yang dimana pemerintah sebagai agen tentunya harus dapat mengelola potensi-potensi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan keuangan yang baik dan akhirnya akan menciptakan kinerja keuangan yang memadai bagi pemerintah daerah dan dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai principal. Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang telah dilakukan tampak bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Apabila Pendapatan Asli Daerah suatu daerah tinggi, maka pemerintah daerah dapat menurunkan ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Sehingga dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kondisi ini, akan mencerminkan kemandirian daerah yang baik, yang dimana pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi dapat mengalokasikan anggaran belanjanya dengan leluasa tanpa harus bergantung terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Risa, 2021) dan (NurRafi, 2023) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik t menunjukkan bahwa variabel sisa lebih perhitungan anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_3 memiliki kontribusi terhadap variabel Y. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar SiLPA maka Belanja Daerah juga akan semakin meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima yang dimana sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Permendagri nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa SiLPA merupakan selisih hasil realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran suatu daerah. SiLPA yang ada pada periode tertentu di suatu daerah merupakan sisa lebih atas penggunaan anggaran pada periode sebelumnya yang nantinya akan digunakan untuk menutupi belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung dimasa yang akan datang sehingga peranan SiLPA berpengaruh besar pada komposisi belanja daerah dimasa yang akan datang. Nilai SiLPA yang semakin tinggi akan menunjukkan adanya ketidakcermatan dalam penganggaran dan adanya kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Apabila pada suatu daerah memiliki angka SiLPA yang tinggi pada tahun berjalan mencerminkan kinerja anggaran yang kurang efektif dan efisien yang dilakukan pada daerah tersebut. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan ataupun belanja daerah harus sisa dan tertunda sampai di akhir periode dan belum terealisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Nurhalisa, 2020) dan (Abdullah, 2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah yang dapat mengakibatkan terjadinya fenomena flypaper effect.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu nilai koefisien Dana Alokasi Khusus sebesar 0,161 dan nilai koefisien Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar 0,154 berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan, nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,471 berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. dikarenakan nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah lebih besar daripada nilai koefisien Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, secara keseluruhan 34 Provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2019-2021 terbukti tidak

adanya fenomena *flypaper effect*.

Tidak adanya fenomena *flypaper effect* pada penelitian ini disebabkan bukan semata-mata pemerintah daerah Provinsi di Indonesia periode tahun 2019-2021 sudah mandiri dalam menghasilkan pendapatan asli daerahnya. Namun, dikarenakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada variabel dana alokasi khusus dalam dana perimbangan, yang dimana diketahui bahwa dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang sedikit jumlahnya diberikan oleh pemerintah pusat. Dana alokasi khusus yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebesar Rp. 185,80 triliun yang hanya diperuntukan untuk kegiatan khusus suatu daerah berdasarkan prioritas negara seperti konektivitas daerah, pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan. Sedangkan, dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebesar Rp. 396,00 triliun yang diperuntukan untuk kegiatan umum daerah seperti penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, dan pendanaan layanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Selain itu, tidak adanya fenomena *flypaper effect* dalam penelitian ini juga dapat diketahui dengan membandingkan nilai maximum DAK dengan nilai Maximum PAD. Dilihat dari angka tersebut, dapat diketahui bahwa nilai dana alokasi khusus lebih kecil dibandingkan nilai pendapatan asli daerah yang artinya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sudah pasti lebih sedikit dibandingkan dana yang dihasilkan oleh daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan terjadi fenomena *flypaper effect*. Namun, apabila dalam penelitian ini menggunakan seluruh dana perimbangan sebagai variabel bebas maka sudah dapat dipastikan adanya fenomena *flypaper effect* yang dikarenakan jumlah total dana perimbangan lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana pendapatan asli daerahnya. Hasil tersebut juga didukung dengan penelitian sebelumnya yang dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rafi, 2023) mendapatkan hasil yaitu terjadi fenomena *flypaper effect* yang disebabkan nilai koefisien DAU dan DAK lebih kecil dibandingkan dengan nilai koefisien PAD.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Syofyan, 2020) juga mendapatkan hasil telah terjadinya fenomena *flypaper effect* yang dikarenakan nilai koefisien dana perimbangan lebih besar daripada nilai koefisien PAD. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khotijah, 2023) dan (Sema, 2021) yang menyatakan bahwa tidak terjadinya fenomena *flypaper effect* yang disebabkan oleh nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah lebih besar dan signifikan daripada nilai koefisien Dana Alokasi Khusus.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menjelaskan bahwa ketika DAK naik, maka Belanja Daerah juga akan mengalami kenaikan. Sehingga pemerintah daerah belum dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi PAD yang dihasilkan maka semakin meningkat pula Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga, pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri karena sudah dapat memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri secara mandiri tanpa harus adanya ketergantungan pada pemerintah pusat. Variabel SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini menjelaskan bahwa nilai SiLPA yang sangat besar menunjukkan masih kurang tepatnya pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran atau masih belum optimalnya penyerapan anggaran. Tidak terjadinya fenomena *flypaper effect*. Hal ini disebabkan oleh nilai koefisien PAD lebih besar dan signifikan daripada nilai koefisien DAK dan SiLPA terhadap Belanja Daerah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah sudah mandiri dan tidak adanya ketergantungan dana secara terus-menerus pada dana pemerintah pusat.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah bagi pemerintah Provinsi Indonesia, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan maupun pembuatan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran

penerimaan dari pemerintah pusat dan dalam menggunakan dana pendapatan daerah dengan lebih efisien dan efektif. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah harus lebih mengeksplorasi sumber-sumber potensi penerimaan baru yang ada di setiap daerah guna memenuhi kebutuhan belanja daerah baik belanja rutin maupun belanja pegawai SiLPA yang semakin tinggi menunjukkan ketidakcermatan dalam penganggaran atau adanya kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. SKPD setiap daerah diharapkan juga untuk dapat lebih mengontrol program yang dilaksanakan agar sesuai dengan prinsip efektif dan efisien. Selain itu, tidak adanya fenomena *flypaper effect* di Provinsi Indonesia periode 2019-2021, sehingga pemerintah daerah diharapkan untuk selalu konsisten di tahun-tahun selanjutnya dengan tetap mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama dari penerimaan daerahnya yang nantinya tidak akan terjadi fenomena *flypaper effect*. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode tahun yang lebih panjang agar mendapatkan hasil yang lebih akurat dan relevan. Selain itu, dalam peningkatan validasi data hendaknya peneliti selanjutnya mengambil sumber dari BPS tidak hanya dalam website DJPK. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 11,5% belanja daerah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan mempertimbangkan variabel lain yang belum diuji seperti menggunakan ketiga dana perimbangan (DAU, DBH, DAK), belanja modal atau dapat menggunakan data non keuangan seperti perilaku oportunistik.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. (2014). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah: Analisis Perubahan APBD Kabupaten/Kota Se-Aceh. *Jurnal Telaah Riset Akuntansi*. 7(1). 52-27.
- Ardanareswari, S. (2019). Fenomena Flypaper Effect pada PAD, DAU dan DBH Serta Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Pulau Jawa Tahun 2013-2017. *Journal of Economic*. 1(4).
- Bangun, S. U. (2019). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2014-2016: <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/13520>
- Dewi, S. R. (2017). Flypaper Effect, PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Journal of Accounting Science*. 1(2). 155-174.
- Hermanto, S. B. (2017). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6(6).
- Juanda, B. (2016). Bambang Juanda dan Dedy Heriwibowo, Konsolidasi Desentralisasi Fiskal melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas
- Kainde, C. (2013). Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung
- Khotijah, S. (2023). Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Manajemen*. 3(1). 531-541.
- Marici, S. (2022). Flypaper Effect Pada Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Kabupaten Lebak Dan Pandeglang Provinsi Banten Periode 2014-2019). *Jurnal Riset Akuntansi*. 7(1). 58-77.
- Nurhalisa, S. (2020). Analisis pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap belanja Daerah. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Palopo.
- NurRafi, R. (2023). Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih

- Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 5(1).
- Riduwan, A. (2021). Analisis Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 10(5).
- Risa, F. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016-2019. *AKUA*. 1(3). 341-350.
- Sema, L. J. (2021). Analisis Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 10(5).
- Solikin, A. (2016). Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 16(1):11.
- Suyatno. (2013). Retrieved from Analisis Disparitas Perekonomian Di Wilayah Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah , Dan Jawa Timur) Periode 1996 – 2011. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syofyan, E. (2020, Mey). Retrieved from Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. 2(2). 2826-2838.
- Yovita, F. M. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010).